

2024



RENJA

RENCANA KERJA

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO



KABUPATEN PONOROGO



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah S.W.T dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik dan lancar. Renja merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode satu tahun.

Dengan disusunnya Renja Tahun 2024 diharapkan pelaksanaan pembangunan di bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta bidang perindustrian lebih terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Sehingga pada akhirnya nanti akan tercapai masyarakat yang sejahtera sebagaimana visi Kabupaten Ponorogo yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)”**.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya dokumen Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 ini kami sampaikan terima kasih. Akhirnya semoga yang tertuang dalam dokumen Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 ini bermanfaat sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 19 Agustus 2024
KEPALA DINAS
PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN PONOROGO

RINGGA DWI HERI IRAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197512091996031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	56
2.2.1 Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo.	58
2.2.2 Sasaran 2 Meningkatnya nilai perdagangan	62
2.2.3 Sasaran 3 Meningkatnya kualitas dan pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ponorogo	64
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	73
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	78
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	103
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	115
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	115
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	116
3.3 Program dan Kegiatan.....	117
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	148
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	150
BAB V PENUTUP	151



Daftar Gambar

Gambar 1. Diagram Perkembangan Koperasi	59
Gambar 2. Diagram Perkembangan Volume Usaha Koperasi	60
Gambar 3. Diagram pertumbuhan omset usaha mikro.....	61
Gambar 4. Grafik perkembangan nilai perdagangan	63
Gambar 5. Perkembangan IKM.....	64



Daftar Tabel

Tabel 1. Label T-C.29 Evaluasi terhadap Hasil Renja Tahun 2023 s/d Triwulan II Tahun 2024	54
Tabel 2. Label T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	57
Tabel 3. Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023	72
Tabel 4. Label T-C.31 Review terhadap Rancangan awal RKPD 2024.....	102
Tabel 5. Label T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024	114
Tabel 6. Label T-C.33 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	147



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai upaya Pemerintah Daerah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, khususnya:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; dan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2024, dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Bupati Ponorogo Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode



1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD) pada Tahun 2024 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Dokumen ini akan bermanfaat bagi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan maupun pembiayaan program untuk tahun 2024.

Renja SKPD berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2024 mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo



Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Ponorogo, didasarkan oleh alasan sebagai berikut:

1. Perubahan tugas pokok dan fungsi SKPD Tahun 2018.
2. Penyusunan indikator dalam Rencana Kerja Tahun 2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2007, dan indikator SPM yang dikeluarkan oleh kementerian teknis masing-masing SKPD dengan memperhatikan Rencana Aksi Nasional (RAN).
3. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Dalam dokumen Renja SKPD, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo sejak awal tahapan penyusunan mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD Tahun 2024 menyajikan nilai pagu indikatif dan indikator capaian telah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA LITBANG dan dianalisis dengan strategi prioritas serta kemampuan kinerja daerah secara menyeluruh.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD pada Tahun 2024 sebagai berikut :



1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan daerah Propinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;



9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
12. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021– 2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro;



17. Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026.
18. Reviu Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026.
19. Reviu kedua Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026.
20. Reviu ketiga Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026.
21. Reviu keempat Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026.
22. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENJA SKPD Tahun 2024 ini adalah :

1. Mengkaji RKPD Kabupaten Ponorogo berdasarkan evaluasi kinerja SKPD tahun sebelumnya, evaluasi pencapaian target RENSTRA SKPD, usulan masyarakat/pemangku kepentingan, serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Disusunnya Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 adalah menyediakan arah acuan bagi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.
2. Merumuskan Daftar Program, Kegiatan, dan Kebutuhan Anggaran Indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo pada Tahun Anggaran 2024.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 ini adalah sebagai dokumen perencanaan adalah agar terdapat



sinerginitas dan kontinuitas dalam perencanaan program dan kegiatan di Kabupaten Ponorogo.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024 perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas program dan kegiatan yang berdampak pada pencapaian indikator kinerja utama sebagaimana tertuang di dalam Renstra dan telah diperjanjikan di perjanjian kinerja setiap tahunnya. Pengukuran dilakukan terhadap indikator program maupun kegiatan tahun berjalan, tahun sebelumnya, serta proyeksi tahun yang akan datang, secara keseluruhan kami tuangkan ke dalam tabel T-C 29.



**Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo
Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024**

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)					
				K	RP	K	RP	K	RP	I		II				III		IV		K	RP
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100	
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	Meningkatkan pelayanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase administrasi yang memenuhi standart tata kelola pemerintah	100 %	10.962.028.880	100 %	10.666.037.948	100 %	10.881.157.021	100%	Rp2.745.225.676	100%	Rp1.922.460.840			100 %	Rp4.667.686.516	100%	Rp15.333.724.464	100%	Rp306.674.489.280



NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				K	RP	K	RP	K	RP	I		II		III		IV				12=8+9+10+11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100						
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
2	nan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan		Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	



NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				5	6	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
	an, urusan tata usaha, perlengkapan		tepat waktu																				
3	panorama kegiatan dan urusan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/	100 %	7.500.000	24 dokumen	123.864.950	100 %	59.165.282	100%	0	100%	Rp13.515.000					100 %	Rp13.515.000	100%	Rp13.737.950	100%	Rp2.747.599.000

DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

RENJA 2024

KABUPATEN PONOROGO

DINAS PERDAGOP & UM
KABUPATEN PONOROGO

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				5	6	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11				13=6+12	
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
	Kep egawai an kep ada se mu a un sur di		kegiatan/ sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasi f dan tepat waktu																		
4	ling kun gan Din as.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat	6 dok ume n	3.75 0.00 0	6 d o k u m e	62.142 .900	5 Dok um en	29.999 .800	5 Doku men	0	5 Doku men	Rp13. 515.0 00			5 Dok um en	Rp13.51 5.000	5 Doku men	Rp75 .657. 900	5 Doku men	Rp1.513 .158.00 0

DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

RENJA 2024

KABUPATEN PONOROGO

DINAS PERDAKOP & UM
KABUPATEN PONOROGO

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				K	RP	K	RP	K	RP	I		II		III		IV		K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100								
			Daerah yang disusun			n																	
5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian	18 Laporan	3.750.000	18 Laporan	61.722.050	5 Laporan	29.165.482	5 Laporan	0	5 Laporan	0					5 Laporan	0	5 Laporan	Rp61.722.050	5 Laporan	Rp1.234.441.000



NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				5	6	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=6+12	14=13/5X100									
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD																				
6		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan	100%	7.607.962.800	100%	7.255.653.368	100%	8.517.879.675	100%	Rp2.190.300.343	100%	Rp1.675.817.121					100%	Rp3.866.117.464	100%	Rp11.121.770.832	100%	Rp222.435.416.640

DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

RENJA 2024

KABUPATEN PONOROGO

DINAS PERDAGOP & UM
KABUPATEN PONOROGO

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				K	RP	K	RP	K	RP	I		II		III		IV		K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100								
			anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu																				
7		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	95 orang/bulan	6.897.069.00	95 orang/bulan	6.426.398.969	100 Orang/Bulan	7.323.870.000	100 Orang/Bulan	Rp2.069.063.343	100 Orang/Bulan	Rp1.133.709.562					100 Orang/Bulan	Rp3.202.772.905	100 Orang/Bulan	Rp9.629.171.874	100 Orang/Bulan	Rp192.583.437.480

DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

RENJA 2024

KABUPATEN PONOROGO

DINAS PERDAKOP & UM
KABUPATEN PONOROGO

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100	
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100	
8		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	36 dokumen	705.893.800	36 dokumen	797.625.499	5 Dokumen	1.174.120.175	5 Dokumen	Rp121.237.000	5 Dokumen	Rp542.107.559					5 Dokumen	Rp663.344.559	5 Dokumen	Rp1.460.970.058	5 Dokumen	Rp29.219.401.160
9		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi	5 laporan	2.500.000	5 laporan	20.976.900	5 Laporan	9.999.800	5 Laporan	0	5 Laporan	0					5 Laporan	0	5 Laporan	Rp20.976.900	5 Laporan	Rp419.538.000



NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=6+12	14=13/5X100										
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD																				
10		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/t riwulanan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusun	4 laporan	2.500.000	4 laporan	10.652.000	5 Laporan	9.889.700	5 Laporan	0	5 Laporan	0					5 Laporan	0	5 Laporan	Rp10.652.000	5 Laporan	Rp213.040.000



NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				5	6	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			an laporan keuangan bulanan/t riwulanan / semesteran SKPD																				
11		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta	80%	350.000.000	100%	670.410.000	80%	454.760.000	80%	Rp250.550.000	80%	0			80%	Rp250.550.000	80%	Rp920.960.000	80%	Rp18.419.200.000		

DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

RENJA 2024

KABUPATEN PONOROGO

DINAS PERDAKOP & UM
KABUPATEN PONOROGO

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				5	6	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=6+12	14=13/5X100									
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
1	2	3	4																				
			penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai																				
12		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 orang	350.000.000	15 orang	560.010.000	100 Orang	454.760.000	100 Orang	Rp250.550.000	100 Orang	0					100 Orang	Rp250.550.000	100 Orang	Rp810.560.000	100 Orang	Rp16.211.200.000

DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

RENJA 2024

KABUPATEN PONOROGO

DINAS PERDAGOP & UM
KABUPATEN PONOROGO

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				K	RP	K	RP	K	RP	I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100								
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
13		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai	100 %	1.050.000	100 %	1.091.532.343	100 %	536.338.715	100 %	Rp18.299.200	100 %	Rp49.682.400			100 %	Rp67.981.600	100 %	Rp1.159.513.943	100 %	Rp23.190.278.860		
14		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran	Jumlah Paket Komponen	50 Paket	50.000.000	50 Paket	10.122.500	50 Paket	7.565.500	50 Paket	0	50 Paket	0			50 Paket	0	50 Paket	Rp10.122.500	50 Paket	Rp202.450.000		



NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				K	RP	K	RP	K	RP	I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100								
		gan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			et																	
15		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 paket	300.000.000	100 paket	185.815.500	5000 Paket	201.244.350	5000 Paket	Rp1.200.000	5000 Paket	Rp41.652.400					5000 Paket	Rp42.852.400	5000 Paket	Rp228.667.900	5000 Paket	Rp4.573.358.000

DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

RENJA 2024

KABUPATEN PONOROGO

DINAS PERDAKOP & UM
KABUPATEN PONOROGO

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				5	6	7	8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100				
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
16		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	200.000.000	12 paket	157.904.400	10000 Paket	166.177.740	10000 Paket	Rp2.509.200	10000 Paket	0				10000 Paket	Rp2.509.200	10000 Paket	Rp160.413.600	10000 Paket	Rp3.208.272.000	
17		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	12 Dokumen	100.000.000	12 dokumen	39.284.000	20 Dokumen	23.710.000	20 Dokumen	Rp4.845.000	20 Dokumen	Rp1.368.000				20 Dokumen	Rp6.213.000	20 Dokumen	Rp45.497.000	20 Dokumen	Rp909.940.000	

DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

RENJA 2024

KABUPATEN PONOROGO

DINAS PERDAKOP & UM
KABUPATEN PONOROGO

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				K	RP	K	RP	K	RP	I		II		III		IV		K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100	
			Disediakan																				
18		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	276.929.943	50000 Laporan	137.641.125	50000 Laporan	Rp 9.745.000	50000 Laporan	Rp6.662.000					50000 Laporan	Rp 16.407.000	50000 Laporan	Rp293.336.943	50000 Laporan	Rp5.866.738.860
19		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan Penyediaan Jasa	100%	1.546.566.080	100%	1.387.256.075	100%	1.166.156.749	100%	Rp265.568.313	100%	Rp173.192.737					100%	Rp438.761.050	100%	Rp1.826.017.125	100%	Rp36.520.342.500

DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

RENJA 2024

KABUPATEN PONOROGO

DINAS PERDAGOP & UM
KABUPATEN PONOROGO

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100	
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4																				
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
20		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	79.860.000	12 laporan	90.589.600	10000 Laporan	11.996.900	10000 Laporan	Rp4.000.000	10000 Laporan	0										
21		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	36 laporan	1.166.706.080	36 laporan	936.419.125	50 Laporan	1.077.493.183	50 Laporan	Rp257.518.313	50 Laporan	Rp168.275.737										

DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

RENJA 2024

KABUPATEN PONOROGO

DINAS PERDAKOP & UM
KABUPATEN PONOROGO

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				5	6	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			Daya Air dan Listrik yang Disediakan			n																	
22		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	100.000.000	12 laporan	31.766.000	10 Laporan	31.616.966	10 Laporan	Rp4.050.000	10 Laporan	0			10 Laporan	Rp4.050.000	10 Laporan	Rp35.816.000	10 Laporan	Rp716.320.000		

DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

RENJA 2024

KABUPATEN PONOROGO

DINAS PERDAKOP & UM
KABUPATEN PONOROGO

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)			
				K	RP	K	RP	K	RP	I		II		III		IV				12=8+9+10+11		13=6+12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100								
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
23		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	200.000.000	13 laporan	382.481.350	10 Laporan	45.049.700	10 Laporan	0	10 Laporan	Rp4.917.000					10 Laporan	Rp4.917.000	10 Laporan	Rp387.398.350	10 Laporan	Rp7.747.967.000
24		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran	80%	400.000.000	100%	137.321.212	80%	146.856.600	80%	Rp20.507.820	80%	Rp10.253.582					80%	Rp30.761.402	80%	Rp168.082.614	80%	Rp3.361.652.280



NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100	
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4																				
			serta pengelolaan pencatatan aset yang akutable																				
25		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	35 Unit	400.000.000	6 unit	137.321.212	35 Unit	146.856.600	35 Unit	Rp20.507.820	35 Unit	Rp10.253.582					35 Unit	Rp30.761.402	35 Unit	Rp168.082.614	35 Unit	Rp3.361.652.280



NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=6+12	14=13/5X100										
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
27	asidansi dan Usaha Mikro yang mengingkatkan SHU dan	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan	80%	200.000.000	0	0	80%	49.999.800	80%	0	80%	0					80%	Rp0	80%	Rp0	80%	Rp0
28			Prosentase koperasi yang mengikuti penghargaan	80%		0	0	80%		80%	0	80%	0					80%	Rp0	80%	Rp0	80%	Rp0

DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

RENJA 2024

KABUPATEN PONOROGO

DINAS PERDAKOP & UM
KABUPATEN PONOROGO

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				K	RP	K	RP	K	RP	I		II		III		IV		K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100	
	om set		kesehatan koperasi																				
29		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 Unit Usaha	200.000.000	0	0	20 Unit Usaha	49.999.800	20 Unit Usaha	0	20 Unit Usaha	0					20 Unit Usaha	Rp0	20 Unit Usaha	Rp0	20 Unit Usaha	Rp0
30	Me ningka tnya kua lita	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha	2,50 %	150.000.000	2,50 %	128.958.500	2,50 %	274.999.800	2,50%	0	2,50%	Rp407.116.546					2,50 %	Rp407.116.546	2,50 %	Rp536.075.046	2,50%	Rp10.721.500.920



NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=6+12	14=13/5X100										
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
	s kop erasi dan per tu mb uha n Usa ha Mikro di Kab upa ten Po	(UMKM)	kecil dan menenga h																				
31		Pemberdayaa n Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi	Prosentas e usaha mikro yang meningka t menjadi usaha kecil dan menenga h	2,50 %	150.000.000	2,50 %	128.958.500	2,50 %	274.999.800	2,50%	0	2,50%	Rp407.116.546	2,50 %	Rp407.116.546	2,50 %	Rp536.075.046	2,50%		2,50%	Rp10.721.500.920		



NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=6+12	14=13/5X100										
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
	nor ogo	dengan Para Pemangku Kepentingan																					
32		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha	80 Unit Usaha	150.000.000	150 unit usaha	17.341.500	80 Unit Usaha	274.999.800	80 Unit Usaha	0	80 Unit Usaha	Rp4.000.000					80 Unit Usaha	Rp4.000.000	80 Unit Usaha	Rp21.341.500	80 Unit Usaha	Rp426.830.000

DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

RENJA 2024

KABUPATEN PONOROGO

DINAS PERDAKOP & UM
KABUPATEN PONOROGO

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				K	RP	K	RP	K	RP	I		II		III		IV		K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100	
			Mikro			a																	
33	Meningkatkan nilai per dagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	11,5 %	275.000.000	11,5 %	123.095.850	11,5 %	19.124.100	11,5%	0	11,5%	Rp403.116.546					11,5 %	Rp403.116.546	11,5 %	Rp526.212.396	11,5%	Rp10.524.247.920
34		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	50%	200.000.000	50 %	121.080.000	50 %	10.000.000	50%	0	50%	Rp9.000.000					50%	Rp9.000.000	50%	Rp130.080.000	50%	Rp2.601.600.000

DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

RENJA 2024

KABUPATEN PONOROGO

DINAS PERDAGOP & UM
KABUPATEN PONOROGO

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100	
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100	
35		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan	700	200.000.000	121.080.000	700	10.000.000	700	0	700	Rp9.000.000					700	Rp9.000.000	700	Rp130.080.000	700	Rp2.601.600.000	

DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

RENJA 2024

KABUPATEN PONOROGO

DINAS PERDAKOP & UM
KABUPATEN PONOROGO

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				K	RP	K	RP	K	RP	I		II		III		IV		K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100	
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
			Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																				
36		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	50%	25.000.000	50%	7.165.850	50%	6.999.100	50%	0	50%	Rp4.000.000					50%	Rp4.000.000	50%	Rp11.165.850	50%	Rp223.317.000
37		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar	Jumlah Dokumen Tanda	8 Dokumen	25.000.000	12	7.165.850	8 Dokumen	6.999.100	8 Dokumen	0	8 Dokumen	Rp4.000.000					8 Dokumen	Rp4.000.000	8 Dokumen	Rp11.165.850	8 Dokumen	Rp223.317.000



NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				5	6	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
		Gudang	Daftar Gudang	n		o	k	u	m	e	n												
38		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Prosentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	50%	50.000.000	0	0	50%	2.125.000	50%	0	50%	Rp390.116.546					50%	Rp390.116.546	50%	Rp390.116.546	50%	Rp7.802.330.920



NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=6+12	14=13/5X100										
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
39		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan	2 Dokumen	50.000.000	0	0	2 Dokumen	2.125.000	2 Dokumen	0	2 Dokumen	Rp0					2 Dokumen	Rp0	2 Dokumen	Rp0	2 Dokumen	Rp0

DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

RENJA 2024

KABUPATEN PONOROGO

DINAS PERDAKOP & UM
KABUPATEN PONOROGO

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				5	6	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																				
40		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	100 %	6.500.000	100 %	2.704.648.952	100 %	2.541.925.141	100%	Rp754.740.243	100%	Rp390.116.546					100 %	Rp1.144.856.789	100%	Rp3.849.505.741	100%	Rp76.990.114.820

DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

RENJA 2024

KABUPATEN PONOROGO

DINAS PERDAKOP & UM
KABUPATEN PONOROGO

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100	
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100	
41		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Indeks sarana dan prasarana perdagangan	60%	6.500.000.000	60%	2.256.375.053	60%	2.541.925.141	60%	Rp754.740.243	60%	Rp390.116.546					60%	Rp1.144.856.789	60%	Rp3.401.231.842	60%	Rp68.024.636.840
42		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	20 Unit	6.500.000.000	28 unit	2.265.375.053	20 Unit	2.541.925.141	20 Unit	Rp754.740.243	20 Unit	Rp376.316.546					20 Unit	Rp1.131.056.789	20 Unit	Rp3.396.431.842	20 Unit	Rp67.928.636.840
43		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN	Prosentase stabilisasi harga barang kebutuhan	0,22%	350.000.000	0,22%	54.737.000	0,22%	41.490.000	0,22%	0	0,22%	Rp13.800.000					0,22%	Rp13.800.000	0,22%	Rp68.537.000	0,22%	Rp1.370.740.000



NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				K	RP	K	RP	K	RP	I		II		III		IV		K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100								
		BARANG PENTING	n pokok dan penting																				
44		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Prosentase pengendalian harga dan stok barang penting di tingkat pasar	0,22 %	350.000.000	0,22 %	54.737.000	0,22 %	41.490.000	0,22%	Rp4.800.000	0,22%	Rp13.800.000					0,22 %	Rp18.600.000	0,22 %	Rp73.337.000	0,22%	Rp1.466.740.000

DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

RENJA 2024

KABUPATEN PONOROGO

DINAS PERDAGOP & UM
KABUPATEN PONOROGO

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				K	RP	K	RP	K	RP	I		II		III		IV		K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100	
45		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	350.000.000	0	0	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	0	2 Laporan	0					2 Laporan	Rp0	2 Laporan	Rp0	2 Laporan	Rp0
46		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga	12 laporan	44.000.000	12	54.737.000	480 Laporan	36.490.000	2 Laporan	Rp4.800.000	2 Laporan	Rp4.800.000					2 Laporan	Rp9.600.000	2 Laporan	Rp64.337.000	2 Laporan	Rp1.286.740.000



NO	SAS AR AN	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOM E) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGRAN RENJA PD YANG DIEVALUASI	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				5	6	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11				13=6+12	
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
		Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegra si dalam Sistem Informasi Perdagangan			ora n															

DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

RENJA 2024

KABUPATEN PONOROGO

DINAS PERDAKOP & UM
KABUPATEN PONOROGO

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100	
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100	
47		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase nilai perdagangan antar wilayah termasuk ekspor	15,75%	450.000.000	0	0	15,75%	175.050.104	15,75%	0	15,75%	Rp9.000.000					15,75%	Rp9.000.000	15,75%	Rp9.000.000	15,75%	Rp180.000.000
48		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu)	Prosentase nilai perdagangan antar wilayah termasuk ekspor	50%	450.000.000	0	0	50%	175.050.104	50%	0	50%	Rp9.000.000					50%	Rp9.000.000	50%	Rp9.000.000	50%	Rp180.000.000

DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

RENJA 2024

KABUPATEN PONOROGO

DINAS PERDAKOP & UM
KABUPATEN PONOROGO

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				K	RP	K	RP	K	RP	I		II		III		IV		K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100	
		Daerah Kabupaten/Kota																					
49		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2 Pelaku Usaha	450.000.000	0	0	2 Pelaku Usaha	175.050.104	2 Pelaku Usaha	0	2 Pelaku Usaha	Rp9.000.000					2 Pelaku Usaha	Rp9.000.000	2 Pelaku Usaha	Rp9.000.000	2 Pelaku Usaha	Rp180.000.000
50		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Prosentase capaian standarisasi dan perlindungan konsumen	10%	200.000.000	10%	44.230.101	10%	49.999.734	10%	Rp 2.820.000	10%	Rp4.400.000					10%	Rp7.220.000	10%	Rp51.450.101	10%	Rp1.029.002.020

DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

RENJA 2024

KABUPATEN PONOROGO

DINAS PERDAKOP & UM
KABUPATEN PONOROGO

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100	
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100	
51		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Prosentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan	100 %	200.000.000	100 %	44.230.101	100 %	49.999.734	100%	Rp 2.820.000	100%	Rp4.400.000					100 %	Rp7.220.000	100%	Rp51.450.101	100%	Rp1.029.002.020
52		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengka	10000 Unit	200.000.000	10000 Unit	44.230.101	10000 Unit	49.999.734	10000 Unit	Rp 2.820.000	10000 Unit	Rp4.400.000					10000 Unit	Rp7.220.000	10000 Unit	Rp51.450.101	10000 Unit	Rp1.029.002.020



NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100	
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4																				
		ta	Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten																				
55		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan	100 Dokumen	100.000.000	6 dokumen	18.600.000	100 Dokumen	10.000.000	100 Dokumen	Rp 1.200.000	100 Dokumen	0					100 Dokumen	Rp1.200.000	100 Dokumen	Rp19.800.000	100 Dokumen	Rp396.000.000



NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)			
				K	RP	K	RP		K	RP	I		II		III				IV		K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5X100							
		Industri	Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																			
56		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembang	15 Dokumen	300.000.000	6 dokumen	344.473.400	15 Dokumen	44.371.500	15 Dokumen	0	15 Dokumen	Rp2.900.000				15 Dokumen	Rp2.900.000	15 Dokumen	Rp347.373.400	15 Dokumen	Rp6.947.468.000

DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

RENJA 2024

KABUPATEN PONOROGO

DINAS PERDAKOP & UM
KABUPATEN PONOROGO

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)			
				5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=6+12	14=13/5X100										
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			uan Sarana dan Prasarana Industri																				
57		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	150 dan 1 pelatihan Dokumen	750.000.000	6 dokumen	30.106.000	150 dan 1 pelatihan Dokumen	491.709.800	150 dan 1 pelatihan Dokumen	Rp410.000	0						150 dan 1 pelatihan Dokumen	Rp410.000	150 dan 1 pelatihan Dokumen	Rp30.516.000	150 dan 1 pelatihan Dokumen	Rp610.320.000



NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2021 - 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (%)	
				5	6	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12	
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
			Masyarakat																
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										350296480788,8 9%		31503327002 2,22%							

Predikat Kinerja
Tabel 1. Label T-C.29 Evaluasi terhadap Hasil Renja Tahun 2023 s/d Triwulan II Tahun 2024



Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja:

1. Meningkatnya partisipasi anggota koperasi karena karena semakin tingginya kesadaran akan berkoperasi,
2. Adanya fasilitasi/pelatihan dalam rangka peningkatan usaha IKM melalui pelatihan-pelatihan bagi IKM
3. Peningkatan dan pengembangan sarana perdagangan

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

1. Tidak terserapnya anggaran secara maksimal:

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah

Berikutnya:



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan di Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut maka perlu dilakukan Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, adapun hasilnya sebagaimana tertuang dalam tabel T-C 30.

Tujuan 1 : Meningkatkan Potensi dan Daya Saing Sektor Koperasi dan Usaha Mikro

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas koperasi dan pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo.

Tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Industri dan Perdagangan

Sasaran 1 : Meningkatnya nilai perdagangan.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ponorogo



**Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Ponorogo**

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2023	2024	2023	2024	2024	2025	
1	Prosentase koperasi aktif	-	-	89,75%	91,00%	85%	91,00%	92,25%	81,54%	89,75%	91,00%	
2	Prosentase peningkatan Volume Usaha Koperasi	-	-	25,00%	27,50%	25,00%	27,50%	122,50%	23,50%	25,00%	27,50%	
3	Prosentase Peningkatan Omset Usaha mikro	-	-	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	96,50%	3,00%	2,50%	2,50%	
4	Prosentase Peningkatan nilai perdagangan	-	-	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	92,80%	2,40%	2,50%	2,50%	
5	Prosentase pertumbuhan IKM	-	-	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	96,00%	0,27%	0,25%	0,25%	

Tabel 2. Label T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



2.2.1 Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo

Sasaran ini merupakan turunan dari tujuan 1 yang merupakan salah satu sasaran dari kepala daerah Kabupaten Ponorogo. Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini dilihat dari capaian indikator sasaran prosentase koperasi aktif sampai akhir Desember 2023. Realisasi pada indikator ini sebesar 81,54%, jika dijabarkan terdapat 828 koperasi aktif dari 1.016 koperasi yang ada di Kabupaten Ponorogo. Jumlah koperasi di Kabupaten Ponorogo bertambah secara dinamis. Di akhir tahun 2023 jumlah koperasi di Kabupaten Ponorogo sebanyak 816 koperasi aktif dan bertambah menjadi 828 koperasi aktif di akhir tahun 2023. Adapun faktor yang mempengaruhi ketidak berhasilan tingkat capaian adalah :

1. Banyak koperasi yang tidak aktif tetapi belum dilakukan pembubaran, sehingga tetap masuk dalam daftar koperasi. Kondisi seperti ini akhirnya mempengaruhi prosentase koperasi aktif di Kabupaten Ponorogo;
2. Kebutuhan anggaran yang sangat besar untuk melakukan pembubaran koperasi tidak aktif, sehingga pelaksanaannya tertunda karena anggaran masih dipergunakan untuk program kegiatan yang lebih prioritas untuk membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo melalui koperasi; dan
3. Tingkat kesadaran pemilik koperasi tidak aktif yang masih rendah yang tidak segera melaporkan ketidak aktifan koperasi ke Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro; dan

- Persaingan antar koperasi yang sangat ketat sehingga membuat koperasi dengan kemampuan usaha rendah semakin tersisih oleh koperasi dengan kemampuan besar.

Data perkembangan koperasi di Kabupaten Ponorogo selama 3 tahun terakhir sebagai berikut :



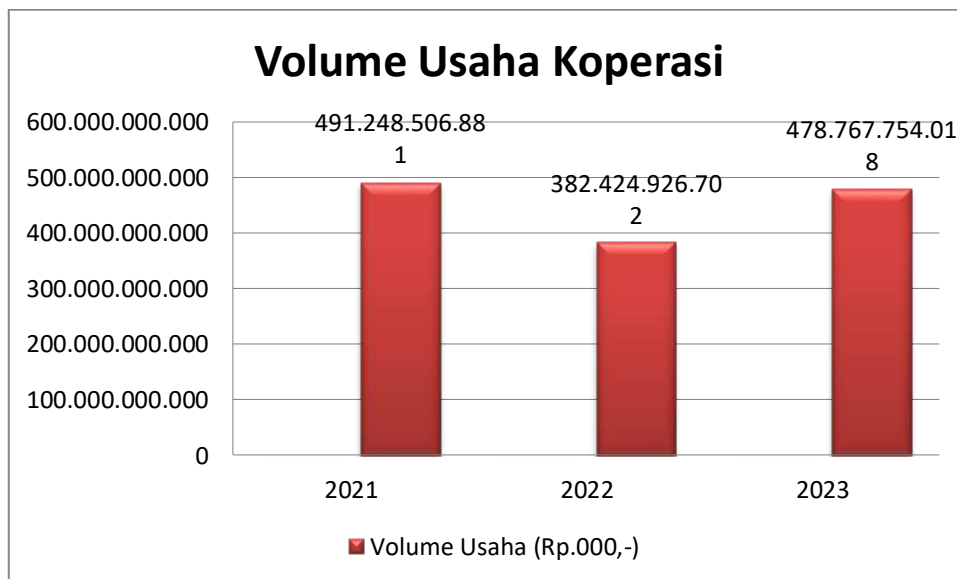
Gambar 1. Diagram Perkembangan Koperasi

Indikator sasaran kedua adalah Prosentase peningkatan volume usaha koperasi. Pada indikator ini tingkat capaiannya sangat tinggi yaitu 91,20%. Jika dijabarkan tingkat capaian tersebut adalah perbandingan antara realisasi dengan target. Realisasi peningkatan volume usaha koperasi tahun 2021 sampai dengan akhir tahun 2023 adalah Rp. 94.430.548.209,- atau 25,20%. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian pada indikator ini adalah :

- Meningkatnya partisipasi anggota koperasi karena karena semakin tingginya kesadaran akan berkoperasi;

2. Kinerja keuangan dan tingkat kesehatan usaha koperasi semakin baik karena pengetahuan pengurus akan koperasi semakin meningkat;
3. Intensitas kegiatan pembinaan, pengawasan dan pendampingan terhadap tata kelola koperasi; dan
4. Kerja sama antara pengurus, pengawas, dan anggota dalam menjalankan koperasi menumbuhkan kekompakan dan sinergitas yang positif.

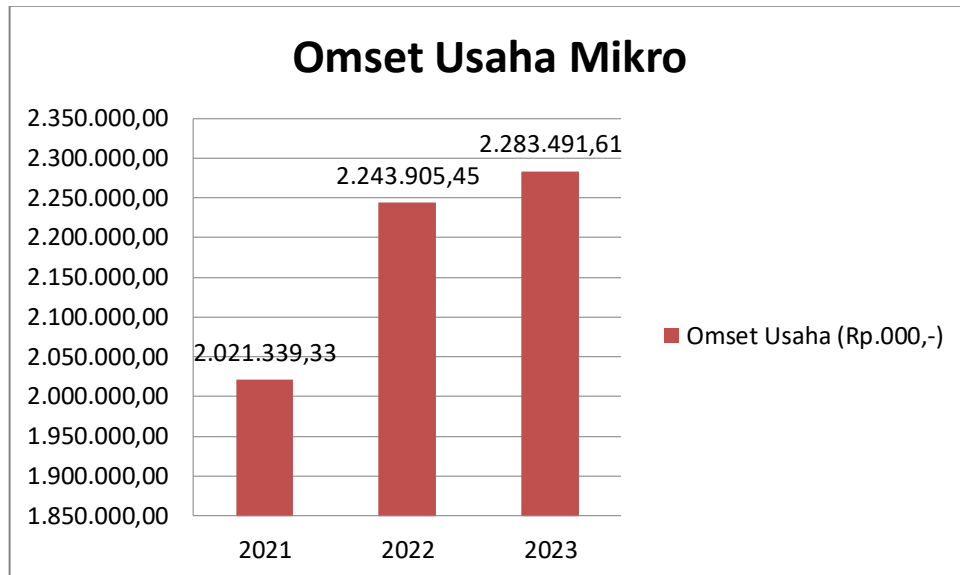
Data perkembangan volume usaha koperasi di Kabupaten Ponorogo selama 3 tahun terakhir sebagai berikut :



Gambar 2. Diagram Perkembangan Volume Usaha Koperasi

Indikator sasaran yang ketiga adalah Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah. Indikator ini adalah tolok ukur pencapaian kinerja pada sasaran peningkatan pertumbuhan usaha mikro Kabupaten Ponorogo. Tingkat pertumbuhan omset usaha mikro tahun 2023 sebesar Rp. 40.659.950 atau sebesar 2%. Pertumbuhan omset Usaha Mikro mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut diagram data

perkembangan omset usaha mikro dalam kurun waktu 3 tahun terakhir :



Gambar 3. Diagram pertumbuhan omset usaha mikro

Peningkatan Omset Usaha Mikro mengalami kenaikan dua kali lipat dari target yaitu sebesar 3% dengan tingkat capaian 200% dan dikategorikan Sangat Tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan antara lain:

1. Persaingan usaha yang mulai terbuka antara masing-masing pengusaha mikro dalam melakukan pemasaran produk masing-masing;
2. Layanan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten untuk usaha mikro dengan bunga yang sangat rendah dibandingkan dengan lembaga perbankan; dan
3. Persepsi masyarakat mulai berubah bahwa membentuk usaha itu tidak sesulit yang dibayangkan, sehingga pola pikir masyarakat sudah mulai beralih untuk menciptakan usaha mandiri.

Dalam upaya untuk meningkatkan tingkat capaian kinerja terhadap sasaran yang telah ditetapkan tersebut terdapat

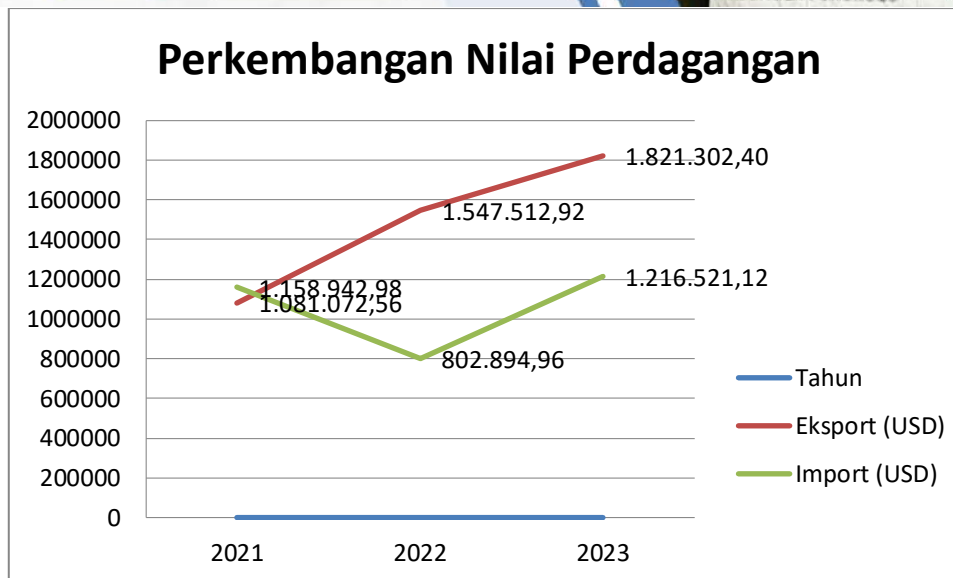


beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan di tahun 2020 antara lain program-program yang mengarah pada pelatihan ketrampilan, motivasi, administrasi dan pengelolaan koperasi;

1. Memperbanyak pegawai yang mempunyai keahlian sebagai penilai kesehatan koperasi sehingga penilaian kesehatan koperasi dapat dilaksanakan lebih maksimal dan menyeluruh.
2. Membentuk program kegiatan yang mengarah pada peningkatan inovasi dan kreatifitas pengusaha mikro dan masyarakat dalam pengembangan produk-produknya;
3. Meningkatkan pelatihan dan pembinaan bagi masyarakat yang mengarah pada penciptaan wirausaha baru di Kabupaten Ponorogo

2.2.2 Sasaran 2 Meningkatnya nilai perdagangan

Sasaran ini merupakan turunan dari tujuan 2. Peningkatan pertumbuhan industri dan perdagangan di Kabupaten Ponorogo diukur dengan indikator yang pertama adalah prosentase peningkatan nilai perdagangan. Perdagangan di Kabupaten Ponorogo terdiri dari perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Untuk saat ini perdagangan dalam negeri lebih dominan dalam komposisi nilai perdagangan, karena untuk perdagangan luar negeri hanya ditopang oleh beberapa exportir yang jumlahnya relatif sedikit. Berikut perkembangan nilai perdagangan di Kabupaten Ponorogo selama 3 tahun terakhir:



Gambar 4. Grafik perkembangan nilai perdagangan

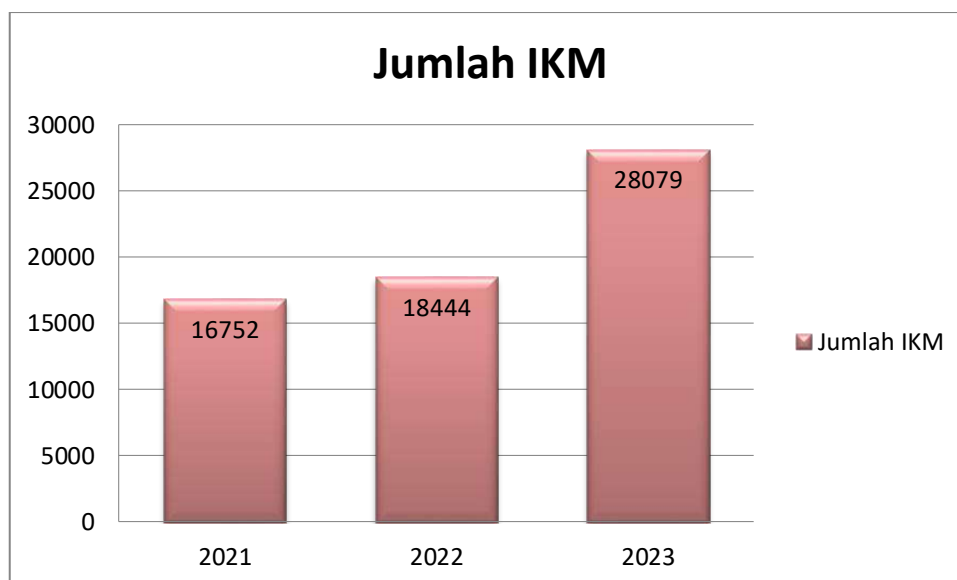
Grafik diatas memperlihatkan bahwa nilai perdagangan di Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2023. Sedangkan target yang telah ditetapkan tahun 2023 adalah 2,50%, sehingga capaian kinerja diangka 100% dapat dikategorikan Sangat Tinggi.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan di tahun 2023 oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo untuk mencapai sasaran antara lain:

1. Promosi produk-produk unggulan Kabupaten Ponorogo di tingkat lokal maupun nasional;
2. Pemantauan terhadap peredaran bahan-bahan pokok dan strategis yang beredar di masyarakat;
3. Peningkatan dan pengembangan sarana perdagangan;
4. Pembinaan dan pengawasan kepada pemilik gudang barang pokok dan penting;
5. Penertiban perijinan usaha kepada pelaku usaha;
6. Pelayanan kemetrolagian kepada masyarakat untuk alat Ukur Timbang Takar dan Perlengkapannya; dan
7. Peningkatan pelayanan pasar-pasar daerah dan revitalisasi pasar-pasar daerah Kabupaten Ponorogo.

2.2.3 Sasaran 3 Meningkatnya kualitas dan pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ponorogo

Sasaran ini merupakan turunan dari tujuan 2. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro yang fokus pada kualitas dan pertumbuhan IKM di Kabupaten Ponorogo. Tolok ukur penilaian capaian kinerja pada sasaran ini adalah prosentase pertumbuhan IKM.



Gambar 5. Perkembangan IKM

Pertumbuhan IKM di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 10,48% atau sejumlah 2.335 IKM Baru. Meskipun mengalami kenaikan tetapi jika dibandingkan dengan target sebesar 30% yang ditetapkan, capaian kinerja termasuk dalam kategori Tinggi. Adapun faktor yang keberhasilan antara lain:

1. Tingginya minat masyarakat, khususnya untuk mendirikan usaha Industri Kecil Menengah.
2. Adanya fasilitasi/pelatihan dalam rangka peningkatan usaha IKM melalui pelatihan-pelatihan bagi IKM.



3. Peningkatan omset IKM melalui promosi produk-produk unggulan IKM di pameran.

Faktor yang mempengaruhi ketidak berhasilan yaitu adanya kendala tidak terserapnya anggaran khususnya pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Dari faktor ketidak berhasilan tersebut, maka Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo memiliki rencana aksi untuk memperbaiki capaian kinerja di tahun 2023 sebagai berikut :

1. Membentuk program kegiatan yang mengarah pada peningkatan inovasi dan kreatifitas IKM dalam pengembangan produk-produknya;
2. Pendampingan dan monitoring bagi wirausaha pemula/IKM baru untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan permodalan dari lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan pemerintah.
3. Pendampingan dalam kegiatan pemasaran dalam hal ini bisa diikutsetakan dalam pameran dan promosi di media sosial (Instagram, Facebook, dll) serta *market place* lokal (Jathitlmart).

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2023, total alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 10.180.164.733,- (*Sepuluh milyar seratus delapan puluh juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah*). Realisasi anggaran selama Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp. 16,726,714,623,- (*Enam belas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah*) atau terealisasi sebesar 96,85% dan alokasi belanja tidak langsung dengan anggaran sebesar Rp. 7,090,324,000,-



(Tujuh milyar sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 6,927,701,153,- (Enam milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu seratus lima puluh tiga rupiah) atau terealisasi sebesar 97,71%.

Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)
		Alokasi	Realisasi	
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,090,324,000	6,927,701,153	97,71%
II	BELANJA LANGSUNG	10,180,164,733	9,799,013,470	96,26%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11,870,637,080	11,471,583,170	96,64%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126,608,421	123,864,950	97,83%
i.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64,836,116	62,142,900	95,85%
ii.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	61,772,305	61,722,050	99,92%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,270,602,107	7,959,422,489	96,24%
i.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,090,324,000	6,927,701,153	97,71%
ii.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,147,560,957	1,000,092,436	87,15%
iii.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22,021,850	20,976,900	95,25%
iv.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	10,695,300	10,652,000	99,60%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	670,860,000	670,410,000	99,93%
i.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	110,400,000	110,400,000	100%



ii.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	560,460,000	560,010,000	99,92%
iii.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0.00%
iv.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangn-undangan	0	0	0.00%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,117,132,620	1,106,022,343	99,01%
i.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,127,400	10,112,500	99,85%
ii.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	422,294,984	421,486,000	99,81%
iii.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	195,939,000	189,615,500	96,77%
iv.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	159,912,320	157,904,400	98,74%
v.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-Undangan	45,540,000	44,294,000	97,26%
vi.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283,318,916	282,609,943	99,75%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163,213,980	142,394,702	87,24%
i.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163,213,980	142,394,702	87,24%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,522,219,952	1,469,468,686	96,53%
i.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90,975,600	90,589,600	99,58%
ii.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,058,914,880	1,014,743,736	95,83%
iii.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,916,500	36,056,000	88,12%
iv.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	331,412,972	328,079,350	98,99%
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	0	0	0%
1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam	0	0	0%



	Daerah Kabupaten/Kota			
i.	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0%
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	21,000,000	17,666,800	84,13%
1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21,000,000	17,666,800	84,13%
i.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	21,000,000	17,666,800	84,13%
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	404,200,000	400,373,000	97,61%
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	410,170,000	400,373,000	97,61%
i.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	410,170,000	400,373,000	97,61%
5	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	30,000,000	28,863,500	96,21%
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	30,000,000	28,863,500	96,21%
i.	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30,000,000	28,863,500	96,21%
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	145,000,000	128,958,500	88,94%



1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	145,000,000	128,958,500	88,94%
i.	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	20,000,000	17,341,500	86,71%
ii.	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	0	0	0%
iii.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0	0	0%
iv.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	125,000,000	111,617,000	89,29%
7	Program Pengembangan UMKM	0	0	0%
1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	0	0	0%
i	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	0	0	0%
8	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	141,260,000	139,023,350	98,42%
1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	127,400,000	125,920,000	98,84%
i.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	127,400,000	125,920,000	98,84%
2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	7,460,000	7,165,850	96,06%
i.	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	7,460,000	7,165,850	96,06%



3	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	6,400,000	5,937,500	92,77%
i.	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	6,400,000	5,937,500	92,77%
10	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3,143,457,153	3,106,733,802	98,83%
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2,679,228,438	2,654,850,074	99,09%
i.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2,679,228,438	2,654,850,074	99,09%
2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	464,228,715	451,883,728	97,34%
i.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	464,228,715	451,883,728	97,34%
11	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	57,600,000	57,137,000	99,20%
1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	57,600,000	57,137,000	99,20%
i.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	57,600,000	57,137,000	99,20%
ii.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	0	0%
2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0%



i	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	0	0	0%
ii	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	0	0	0%
12	Program Pengembangan Ekspor	0	0	0%
1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0%
i.	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	0	0	0%
13	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	50,000,000	49,830,101	99,66%
1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan pengawasan	50,000,000	49,830,101	99,66%
i.	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	50,000,000	49,830,101	99,66%
ii.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	0	0	0%
14	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	357,856,400	357,302,350	99,85%
1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	357,856,400	357,302,350	99,85%
i.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	357,856,400	357,302,350	99,85%
ii.	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	0	0	0%
15	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1,023,508,100	950,993,750	92,92%
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1,023,508,100	950,993,750	92,92%
i.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	513,400,000	488,134,000	95,08%



ii.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	0	0	0%
iii.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100,000,000	99,786,350	99,79%
iv.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	20,000,000	18,600,000	93,00%
v.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	390,108,100	344,473,400	88,30%
vi.	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0	0	0%
16	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	20,000,000.00	18,249,300	91,25%
1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	20,000,000.00	18,249,300	91,25%
i.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	20,000,000.00	18,249,300	91,25%
	JUMLAH	17,270,488,733	16,726,714,623	96,85%

Tabel 3. Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro bahwa Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta bidang perindustrian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta bidang perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta bidang perindustrian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal yang kritis terkait dengan pelayanan SKPD dalam mengoperasionalkan tugas pokok dan fungsi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Secara umum dan normatif suatu hal yang mempengaruhi pelayanan SKPD adalah proses manajemen mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi



program/kegiatan. Proses tersebut merupakan serangkaian tahapan kritis yang harus kita kelola melalui penyusunan manajemen resiko sehingga sebelum dilaksanakan akan dapat diantisipasi atau diminimalisir dampak negatif atau penyimpangannya. Oleh karena itu setiap tahapan tersebut harus bisa dikoordinasikan dan integrasikan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Adapun permasalahan atau hambatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait dengan Isu-Isu penting dan strategis pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo, antara lain :

A. Permasalahan

1. Terbatasnya alokasi anggaran Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo merupakan permasalahan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya karena masih banyaknya usulan masyarakat yang belum tercover, Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan 3 urusan pilihan yaitu di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro yang paralel dengan tugas lembaga negara di 3 (tiga) Kementerian yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi. Sehingga perlu dukungan dana yang memadai;
2. Pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran serta tolok ukur kinerja SKPD oleh aparatur Perangkat Daerah masih rendah, sehingga menyebabkan proses perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan di tingkat lapang seringkali masih bias;



3. Kesulitan akses mendapatkan permodalan tanpa/dengan bunga yang kecil ke lembaga keuangan untuk UKM dan IKM yang membutuhkan permodalan sebagai pengembangan usaha, sehingga perlu dibentuk adanya lembaga oleh Pemerintah Daerah semacam Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD);
4. Kondisi sarana dan prasarana pasar di Kabupaten Ponorogo yang kurang layak sehingga perlu diadakan revitalisasi pasar;
5. Jumlah IKM di Kabupaten Ponorogo yang banyak dan berpotensi tetapi produk-produknya belum banyak dikenal oleh masyarakat lokal ataupun masyarakat luar, sehingga perlu dibangun Lingkungan Industri Kecil (LIK) sebagai tempat pengenalan produk IKM mulai dari proses produksi sampai dengan produk jadi.

B. Hambatan :

Hambatan yang dihadapi Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo kedepan dalam meningkatkan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Keterbatasan tenaga Sumber Daya Manusia dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan dan penyuluhan kepada masyarakat;
2. Sikap kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam berusaha relatif lemah; dan
3. Lemahnya dukungan permodalan bagi IKM dan UKM.

C. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah :



Adanya hambatan atau isu-isu strategis tersebut diatas secara umum tidak banyak berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan pembangunan masing-masing SKPD dengan serangkaian program/kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat implementasinya dimasyarakat telah terjadi sinergisitas antar sektor.

Aspek partisipasi masyarakat umumnya dalam menggerakkan roda ekonomi secara makro berjalan secara normatif dan sistematis, sehingga pemerintah hanya dominan bergerak pada posisi fasilitator dan regulator, dengan syarat aspek keamanan dan iklim kondusif menjamin aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

D. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

1. Tantangan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD menjadi prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain membentuk koperasi menjadi koperasi yang tangguh, professional dan mandiri; memacu pertumbuhan wirausaha baru; revitalisasi sarana perdagangan dan penataan PKL yang ada di Kabupaten Ponorogo. Semua itu untuk menuju Ponorogo yang lebih maju, berbudaya dan religious.

2. Peluang

Adapun peluang yang potensial antara lain :

- a. Berkembangnya keberadaan Koperasi, IKM dan UKM di Kabupaten Ponorogo;



- b. Banyaknya produk-produk yang dihasilkan oleh IKM dan UKM di Kabupaten Ponorogo;
- c. Motivasi yang tinggi dari pelaku usaha;
- d. Sumber daya alam yang memadai untuk bahan baku produk industri tertentu;
- e. Kebutuhan akan barang dan jasa semakin meningkat;

E. Formulasi Isu-isu Strategis

Formulasi isu-isu strategis berupa rekomendasi perumusan program dan kegiatan, antara lain :

1. Setiap program/kegiatan baik usulan dari masyarakat melalui musrenbang maupun usulan SKPD harus benar-benar dipadukan menjadi satu kesatuan program/kegiatan yang mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah;
2. Revitalisasi sarana perdagangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan penggunaan belanja langsung dengan melakukan efisiensi pada belanja tidak langsung, belanja pegawai, dan belanja perjalanan dinas serta memperkecil silpa yang disebabkan kurang cermatnya perencanaan;
4. Pelaksanaan program/kegiatan menekankan pada azas keadilan dan pemerataan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat untuk mengurangi disparitas kesejahteraan; dan
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan senantiasa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur baik di internal SKPD antar SKPD dan antar SKPD dengan masyarakat/kelompok masyarakat penerima manfaat.



2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Renja SKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam dokumen Renja SKPD memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi. Dokumen Renja SKPD juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.

Identifikasi atas rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan yang dikonsolidasikan dalam KUA dan PPAS sebagai Dasar penyusunan RKA SKPD sebagaimana terdapat pada tabel T-C.31.



Tabel T-C.31
 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
 Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
 Kabupaten Ponorogo

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase administrasi yang memenuhi standart tata kelola pemerintah	100%	10.268.163.317	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase administrasi yang memenuhi standart tata kelola pemerintah	100%	10.881.157.021	
			Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasif dan tepat waktu	100%				Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasif dan tepat waktu	100%		



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasif dan tepat waktu	100%	58.605.282	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipasif dan tepat waktu	100%	59.165.282	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang disusun	6 dokumen	29.999.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang disusun	6 dokumen	29.999.800	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18 dokumen	28.605.482	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18 dokumen	29.165.482	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu	100%	8.318.669.275	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu	100%	8.517.879.675	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ketersediaan gaji ASN	1 tahun	7.323.870.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ketersediaan gaji ASN	1 tahun	7.323.870.000	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah pegawai dalam tim penatausahaan kegiatan	64 orang	974.799.775	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah pegawai dalam tim penatausahaan kegiatan	64 orang	1.174.120.175	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5 laporan	9.999.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5 laporan	9.999.800	
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan triwulanan yang disusun	4 laporan	9.999.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan triwulanan yang disusun	4 laporan	9.889.700	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai	100%	297.560.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai	100%	454.760.000	
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 orang	297.560.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 orang	454.760.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai	100%	365.121.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan prasarana perangkat daerah yang memadai	100%	536.338.715	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah alat-alat elektronik penerangan kantor yang tersedia	50 buah	7.565.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah alat-alat elektronik penerangan kantor yang tersedia	50 buah	7.565.500	
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah pegawai dan peserta rapat yang mendapatkan makanan dan minuman	8 unit	120.622.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	8 unit	201.244.350	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah blangko kantor dan penggandaan yang tersedia	10 jenis	127.700.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah blangko kantor dan penggandaan yang tersedia	10 jenis	166.177.740	
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia	2900 eksemplar		28.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia	2900 eksemplar	23.710.000
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	200 kali	80.732.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	200 kali	137.641.125	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.088.065.460	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.166.156.749	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat menyurat yang dikelola	1 Tahun	14.996.900	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat menyurat yang dikelola	1 Tahun	11.996.900	
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	36 lembar pembayaran	1.017.574.660	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	36 lembar pembayaran	1.077.493.183	
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	10 unit	24.924.200	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	10 unit	31.616.966	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah peralatan kebersihan dan jasa kebersihan yang tersedia	1 Tahun	30.569.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah peralatan kebersihan dan jasa kebersihan yang tersedia	1 Tahun	45.049.700	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akutable	100%	140.142.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akutable	100%	146.856.600	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan dan perizinan	5 unit	140.142.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan dan perizinan	5 unit	146.856.600	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		Prosentase koperasi yang dinilai kesehatannya	80%	49.999.800	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		Prosentase koperasi yang dinilai kesehatannya	80%	49.999.800	
2.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	100 koperasi	49.999.800	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	100 koperasi	49.999.800	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta pelatihan penilaian kesehatan bagi pengurus KSP/USP	60 orang	49.999.800	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta pelatihan penilaian kesehatan bagi pengurus KSP/USP	60 orang	49.999.800	
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah	2,50%	49.999.800	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah	2,50%	274.999.800	
3.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan,		Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah	2,50%	49.999.800	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan,		Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan menengah	2,50%	274.999.800	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					
3.1.1	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	150 Unit Usaha	49.999.800	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	150 Unit Usaha	274.999.800	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	11.50%	21.999.100	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	11.50%	19.124.100	
4.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swakayan		Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	11.50%	10.000.000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swakayan		Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	11.50%	10.000.000	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	10.000.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Prosentase penerbitan tanda daftar gudang	50%	4.999.100	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Prosentase penerbitan tanda daftar gudang	50%	6.999.100	
4.2.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	12 Dokumen	4.999.100	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	12 Dokumen	6.999.100	
4.3	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Prosentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	50%	7.000.000	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Prosentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	50%	2.125.000	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.3.1	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	7.000.000	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	2.125.000	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Prosentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	100%	2.425.013.649	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Prosentase Pengumpulan Informasi penjualan rokok tanpa cukai / ilegal	100%	2.541.925.141	
5.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Indeks sarana dan prasarana perdagangan	60%	2.425.013.649	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Indeks sarana dan prasarana perdagangan	60%	2.541.925.141	
5.1.1	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	28 unit	2.425.013.649	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	28 unit	2.541.925.141	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Prosentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting	0,22%	38.000.000	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Prosentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting	0,22%	41.490.000	
6.1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Prosentase pengendalian harga dan stok barang penting di tingkat pasar	0,22%	38.000.000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota		Prosentase pengendalian harga dan stok barang penting di tingkat pasar	0,22%	41.490.000	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.1.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barag Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 laporan	33.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barag Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 laporan	36.490.000	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.1.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	5.000.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	5.000.000	
7	Program Pengembangan Ekspor		Prosentase nilai perdagangan antar wilayah termasuk ekspor	15,75%	125.975.600	Program Pengembangan Ekspor		Prosentase nilai perdagangan antar wilayah termasuk ekspor	15,75%	175.050.104	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase nilai perdagangan antar wilayah termasuk ekspor	50%	125.975.600	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase nilai perdagangan antar wilayah termasuk ekspor	50%	175.050.104	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.1.1	Pameran Dagang Nasional		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2 pelaku usaha	125.975.600	Pameran Dagang Nasional		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2 pelaku usaha	175.050.104	
8	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		Prosentase capaian standarisasi dan perlindungan konsumen	100%	49.999.734	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		Prosentase capaian standarisasi dan perlindungan konsumen	100%	49.999.734	
8.1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang		Prosentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan	100%	49.999.734	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang		Prosentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan	100%	49.999.734	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat T akar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10000 UTTP	49.999.734	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat T akar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10000 UTTP	49.999.734	
9	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Prosentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Industri	100%	550.088.000	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Prosentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Industri	100%	546.081.300	
9.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	100%	550.088.000	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	100%	546.081.300	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	6 dokumen	10.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	6 dokumen	10.000.000	
9.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6 dokumen	48.378.200	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6 dokumen	44.371.500	
9.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	491.709.800	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	491.709.800	

Tabel 4. Label T-C.31 Review terhadap Rancangan awal RKPD 2024



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 didasarkan pada Reviu Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang disusun untuk Tahun 2024 disamping hasil survey kelapangan, juga menerima masukan dan usulan dari kelompok masyarakat berupa proposal serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Usulan program dan kegiatan tersebut disajikan dalam tabel T-C 32.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Ponorogo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ponorogo	Prosentase administrasi perkantoran sesuai SOP	85%	
			Prosentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	20%	
			Prosentase perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	80%	
			Prosentase pegawai yang mengikuti diklat/bimtek	1,5%	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ponorogo	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	24 dokumen	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ponorogo	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang diketik	6 dokumen	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ponorogo	Jumlah Laporan Kinerja (LKj) yang diketik	18 dokumen	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	1 tahun	
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	9 laporan	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ketersediaan gaji ASN	1 tahun	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ponorogo	Jumlah pegawai dalam tim penatausahaan kegiatan	64 orang	
1.2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5 laporan	
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah laporan keuangan triwulanan yang disusun	4 laporan	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.3	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	20%	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas yang tersedia	100 buah	
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 orang	
1.3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Ponorogo	Jumlah kegiatan sosialisasi tentang cukai	21 kegiatan	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah peserta sosialisasi tentang cukai	1140 peserta	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Prosentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	80%	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah alat-alat elektronik penerangan kantor yang tersedia	50 buah	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	8 unit	
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah pegawai dan peserta rapat yang mendapatkan makanan dan minuman	1 tahun	
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ponorogo	Jumlah blangko kantor dan penggandaan yang tersedia	10 jenis	
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Ponorogo	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia	2900 eksemplar	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	200 kali	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ponorogo	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 unit	
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ponorogo	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 unit	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ponorogo	Prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	80%	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ponorogo	Jumlah surat menyurat yang dikelola	1 Tahun	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ponorogo	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	36 lembar pembayaran	
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ponorogo	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	10 unit	
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ponorogo	Jumlah peralatan kebersihan dan jasa kebersihan yang tersedia	1 Tahun	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ponorogo	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	80%	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ponorogo	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan dan perizinan	5 unit	
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Ponorogo	Prosentase Koperasi Aktif	91%	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang difasilitasi penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam	100 koperasi	
2.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ponorogo	Jumlah sewa server yang diadakan	1 paket	
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Ponorogo	Prosentase koperasi yang dinilai kesehatannya	91%	
3.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ponorogo	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	100 koperasi	
3.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah peserta pelatihan penilaian kesehatan bagi pengurus KSP/USP	60 orang	
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Ponorogo	Prosentase peningkatan volume usaha koperasi	27,50%	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian	3 kegiatan	
4.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Ponorogo	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan batik ecoprint bagi anggota koperasi	60 orang	
			Jumlah peserta pelatihan pembuatan konten iklan produk UKM bagi anggota koperasi	60 orang	
			Jumlah peserta pelatihan pengelolaan produk jasa keuangan syariah dan perlakuan akuntansi bagi Koperasi Syariah	60 orang	
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Ponorogo	Prosentase peningkatan omset usaha mikro	2,50%	
5.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Ponorogo	Jumlah kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	1 kegiatan	
5.1.1	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Ponorogo	Jumlah pelaku usaha mikro peserta forum keperantaraan akses penguatan pemodalannya bagi usaha mikro	46 orang	
6	Program Pengembangan UMKM	Ponorogo	Prosentase peningkatan omset usaha mikro	2,50%	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Ponorogo	Jumlah kegiatan pengembangan usaha mikro	2 kegiatan	
6.1.1	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Ponorogo	Jumlah peserta pelatihan anyaman plastik	30 orang	
			Jumlah peserta pelatihan makanan minuman	35 orang	
7	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Ponorogo	Prosentase Pengajuan Rekomendasi Izin Retail Modern	20%	
			Prosentase Pengajuan Rekomendasi Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)	400 orang	
			Prosentase Pengajuan Rekomendasi Izin Minuman Beralkohol	500 UTTP	
7.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swakayan	Ponorogo	Jumlah pelaku usaha yang di fasilitasi perizinan retail modern	10 pelaku usaha	
7.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Ponorogo	Jumlah rekomendasi perizinan sektor retail modern yang diproses	10 rekomendasi	
			Jumlah data pelaku usaha sektor retail modern	50 data	
7.2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Ponorogo	Jumlah pelaku usah yang difasilitasi perizinan Gudang	2 pelaku usaha	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.2.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Ponorogo	Jumlah rekomendasi perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) yang di proses	2 rekomendasi	
			Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan laporan stok gudang	1 laporan	
			Jumlah data pelaku usaha gudang	6 data	
7.3	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Ponorogo	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi perizinan Minuman Beralkohol	1 pelaku usaha	
7.3.1	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Jumlah rekomendasi perizinan Minuman Beralkohol	1 rekomendasi	
			Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan laporan minuman beralkohol	1 laporan	
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Ponorogo	Prosentase Pengumpulan Informasi penjualan rokok tanpa cukai / ilegal	100%	
			Prosentase capaian PAD Pasar Daerah	100%	
			Prosentase Pasar dalam kondisi baik	90%	
8.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Ponorogo	Jumlah pasar daerah yang dilakukan pemeliharaan	24 pasar daerah	
8.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Ponorogo	Jumlah cold storage dan genset yang diadakan	1 paket	
			Jumlah pengadaan alat kebersihan untuk pasar daerah	24 pasar daerah	
			Jumlah pengadaan perlatan sistem informasi pasar	1 paket	
8.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Ponorogo	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pasar malam	400 pelaku usaha	
			Jumlah peserta yang mengikuti study banding	30 orang	
8.2	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana	Ponorogo	Jumlah informasi mengenai penjualan rokok tanpa cukai/ ilegal	17 lokasi	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Ponorogo	Jumlah pengumpulan informasi penjualan rokok tanpa cukai /ilegal		
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Ponorogo	Prosentase Monitoring dan Evaluasi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	
9.1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Ponorogo	Jumlah monitoring dan evaluasi barang kebutuhan pokok dan barang penting	18 monitoring	
9.1.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Ponorogo	Jumlah temuan barang yang tidak layak edar	5 temuan	
			Jumlah pedagang yang menjual barang pokok tidak sesuai HET	10 temuan	
			Jumlah informasi harga barang kebutuhan pokok dan penting	18 pasar	
			Jumlah pangkalan LPG yang melanggar aturan	4 pangkalan	
9.2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ponorogo	Jumlah monitoring dan evaluasi barang barang penting	6 monitoring	
9.2.1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Ponorogo	Jumlah kios pupuk yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	10 kios pupuk	
10	Program Pengembangan Ekspor	Ponorogo	-	100%	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ponorogo	Jumlah IKM/UKM yg mengikuti pameran dan misi dagang	1 pameran	
10.1.1	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Ponorogo	Jumlah IKM/UMKM/Pelaku Usaha yang mengikuti promosi/misi dagang	2 misi dagang 5 IKM/Ukm yang mengikuti Pameran Lokal	
11	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Ponorogo	Prosentase alat uttp yang ditera , tera ulang	66,15%	
11.1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Ponorogo	Jumlah pelaksanaan kegiatan tera , tera ulang	50 kegiatan	
11.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Ponorogo	Jumlah uttp yang ditera / tera ulang	250 UTPP	
13	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Ponorogo	Prosentase pertumbuhan IKM	0,25%	
13.1	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Ponorogo	Jumlah laporan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	5 laporan	
13.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan	Ponorogo	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	1 laporan	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.1.2	Indsutri				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Ponorogo	Prosentase peningkatan kapasitas produksi IKM Sentra Industri	5%	
			Jumlah pengembangan /upgrade aplikasi Jathil Mart	2 Paket	
			Jumlah unit pengadaan furniture gedung galeri Sentra Industri	11 Unit	
			Jumlah produk IKM yang terdisplay di Jathil Mart	600 Produk	
Jumlah transaksi di Jathil Mart	10.000.000				
14	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Ponorogo	Prosentase pertumbuhan IKM	0,25%	
14.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Ponorogo	Prosentase Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	20%	
14.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IUPI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Ponorogo	Prosentase Terverifikasinya permohonan Verifikasi Lapangan	100%	



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				
14.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Ponorogo	Jumlah data kadar Tar dan Nikotin dalam Rokok yang beredar di Kabupaten Ponorogo	4 perusahaan rokok lokal	
15	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Ponorogo	Prosentase pertumbuhan IKM	0,25%	
15.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Ponorogo	Jumlah IKM yang terdaftar di SIINAS	50 IKM	
15.1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Ponorogo	Jumlah IKM yang terdaftar di SIINAS		

Tabel 5. Label T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mempunyai visi “Menuju Ponorogo yang lebih maju, berbudaya dan religius”. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai Perangkat Daerah, serta perannya sebagai Dinas Teknis yang menangani Koperasi dan Usaha Mikro tidak hanya mengacu, tetapi juga selaras dan mendukung visi pembangunan Kabupaten Ponorogo.

Tujuan pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro, perdagangan dan perindustrian merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang diprioritaskan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan Potensi dan Daya Saing Sektor Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Industri dan Perdagangan.

Diantara program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, ada program yang mendukung program prioritas nasional antara lain Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, Nilai tambah sektor riil dan Industrialisasi dan kesempatan kerja. Program tersebut adalah

1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial,
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan,
3. Program Pembinaan Industri, dan
4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah mendasar pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2016 – 2024 yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)”**, selanjutnya Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro memiliki kontribusi untuk mewujudkan sebagian Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yaitu **“_Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)”**.

Tujuan pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro, perdagangan dan perindustrian merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang diprioritaskan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan yang hebat dan berdaya saing; dan
2. Mewujudkan pengembangan pariwisata berbasis potensi daerah dan ekonomi kreatif

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro, perdagangan dan perindustrian sesuai Renstra SKPD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan industry pengolahan produk pertanian; dan
2. Terwujudnya pariwisata Ponorogo yang berkelanjutan, berbasis budaya sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.



3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Reviu Rencana Strategis SKPD disamping juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang /Forum Perangkat Daerah.

Selanjutnya penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo menempatkan program dan kegiatan pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro, perdagangan dan perindustrian tahun 2024 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas koperasi dan pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Ponorogo

Sasaran tersebut dicapai dengan 3 program dan 5 kegiatan. adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Program pembinaan lingkungan sosial, meliputi kegiatan :
 - a. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat.
 - b. Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat.
2. Program pengembangan koperasi dan usaha mikro, meliputi kegiatan :
 - a. Pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi dan Usaha Mikro.
 - b. Peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil menengah
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, meliputi kegiatan :



- a. Pengembangan Sarana Pemasaran produk Usaha Mikro kecil Menengah

Sasaran 2. Meningkatnya nilai perdagangan

Sasaran tersebut dicapai dengan 5 program dan 9 kegiatan. adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Program revitalisasi pusat perdagangan, meliputi kegiatan:
 - a. Kegiatan revitalisasi pasar.
2. Program Pemberantasan barang kena cukai ilegal, meliputi kegiatan:
 - a. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.
3. Program pengembangan dan pengelolaan pasar, meliputi kegiatan:
 - a. Pemeliharaan dan kebersihan pasar.
 - b. Peningkatan ketertiban dan keamanan pasar.
 - c. Operasional pengelolaan pasar.
4. Program peningkatan dan pengembangan perdagangan, meliputi kegiatan:
 - a. Peningkatan dan pengembangan sarana perdagangan.
 - b. Pengadaan, penyaluran dan pengawasan perdagangan.
 - c. Fasilitasi pengembangan sarana promosi.
5. Program Kemetrolgian, meliputi kegiatan:
 - a. Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah.

Sasaran 3. Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ponorogo.



Sasaran tersebut dicapai dengan 3 program dan 3 kegiatan. adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Program pembinaan industri, meliputi kegiatan :
 - a. Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau skala kecil.
2. Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah, meliputi kegiatan :
 - a. Pemberian kemudahan izin usaha IKM
3. Program Pengembangan Lingkungan Industri
 - a. Pembangunan dan Pengembangan Lingkungan Industri

Sasaran 4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Sasaran tersebut dicapai dengan 4 program dan 15 kegiatan. adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Program pelayanann administrasi perkantoran, meliputi kegiatan :
 - a. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penyediaan makanan dan minuman.
 - c. Penyediaan jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan
 - d. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga.
 - f. Penyediaan jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan.
 - g. Penyediaan jasa kebersihan kantor.



- h. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, meliputi kegiatan :
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan sarana prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - b. Pengadaan pakaian kerja lapangan/pakaian kerja khusus
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, meliputi kegiatan :
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - b. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD.
 - c. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan keuangan akhir tahun.

Adapun rincian program/kegiatan beserta pagu indikatifnya sebagaimana tertuang di dalam tabel T-C 33.



Tabel T-C.33 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo

No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Koperasi dan Usaha Mikro	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Prosentase Koperasi yang dinilai kesehatannya	Prosentase Koperasi yang dinilai kesehatannya	80	80	80	%	49.999.800	49.999.800	49.999.800	49.999.800	Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase koperasi yang dinilai kesehatannya	Prosentase koperasi yang dinilai kesehatannya	80	80	80	%	49.999.800	49.999.800	49.999.800	49.999.800	



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20	20	20	Unit Usaha	49.999.800	49.999.800	49.999.800	49.999.800	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,	Prosentase usaha mikro yang meningkat	Prosentase usaha mikro yang meningkat	2,5	2,5	2,5	%	49.999.800	49.999.800	49.999.800	274.999.800	



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	at menjadi usaha kecil dan menengah	at menjadi usaha kecil dan menengah									
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan	Prosentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil dan	2,5	2,5	2,5	%	49.999.800	49.999.800	49.999.800	274.999.800	



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		an Perizinan , Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	an Perizinan , Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	menengah	menengah									
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang	Jumlah Unit Usaha yang	80	80	80	Unit Usaha	49.999 .800	49.999 .800	49.999 .800	274.999 .800	



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Mikro	Mikro	Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro									
2	Perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAF TARAN PERUSAHAAN	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAF TARAN PERUSAHAAN	Prosent ase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	Prosent ase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	11,5	11,5	11,5	%	21.999 .100	21.999 .100	21.999 .100	19.124. 100	



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	Prosentase pelaku usaha yang mengajukan perijinan	50	50	50	%	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalaya	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalaya	700	700	700	Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		si Secara Elektronik	si Secara Elektronik	n Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	n Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Prosentase pelaku usaha	Prosentase pelaku usaha	50	50	50	%	4.999.100	4.999.100	4.999.100	6.999.100	



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				yang mengajukan perijinan	yang mengajukan perijinan									
		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	8	8	8	Dokumen	4.999.100	4.999.100	4.999.100	6.999.100	
		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	Prosentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman	Prosentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman	50	50	50	%	7.000.000	7.000.000	7.000.000	2.125.000	



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	n Berlakohol Golongan B dan C	n Berlakohol Golongan B dan C									



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan	2	2	2	Dokumen	7.000.000	7.000.000	7.000.000	2.125.000	



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	Prosentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	100	100	100	%	2.425.013.649	2.425.013.649	2.425.013.649	2.541.925.141	
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Indeks sarana dan prasarana perdagangan	Indeks sarana dan prasarana perdagangan	60	60	60	%	2.425.013.649	2.425.013.649	2.425.013.649	2.541.925.141	



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	20	20	20	Unit	2.425.013.649	2.425.013.649	2.425.013.649	2.541.925.141	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN	Prosentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan	Prosentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan	0,22	0,22	0,22	%	38.000.000	38.000.000	38.000.000	41.490.000	



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		BARANG PENTING	BARANG PENTING	penting	penting									
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat	Prosentase pengendalian harga dan stok barang penting di tingkat pasar	Prosentase pengendalian harga dan stok barang penting di tingkat pasar	0,22	0,22	0,22	%	38.000.000	38.000.000	38.000.000	41.490.000	



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pasar Kabupaten/Kota	Pasar Kabupaten/Kota											
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	480	480	480	Laporan	33.000.000	33.000.000	33.000.000	36.490.000	



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan									
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi	2	2	2	Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN	Prosentase capaian standarisasi dan perlindungan	Prosentase capaian standarisasi dan perlindungan	10	10	10	%	49.999.734	49.999.734	49.999.734	49.999.734	



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		KONSUMEN	KONSUMEN	ngan konsum en	ngan konsum en									
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Prosentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengaw	Prosentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengaw	100	100	100	%	49.999.734	49.999.734	49.999.734	49.999.734	



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				asan	asan									
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera	10000	10000	10000	Unit	49.999.734	49.999.734	49.999.734	49.999.734	



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Ulang	Ulang									
3	Perindustrian	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Industri	Prosentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Industri	100	100	100	%	550.088.000	550.088.000	550.088.000	546.081.300	



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	100	100	100	%	550.088.000	550.088.000	550.088.000	546.081.300	



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilay	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilay	100	100	100	Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				ahan Industri	ahan Industri									
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan	15	15	15	Dokumen	48.378.200	48.378.200	48.378.200	44.371.500	



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Sarana dan Prasarana Industri	Sarana dan Prasarana Industri									
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan	150 dan 1	150 dan 1	150 dan 1	Dokumen dan Pelatihan	491.709.800	491.709.800	491.709.800	491.709.800	



No	Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggungjawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Peran Serta Masyarakat	Peran Serta Masyarakat									

Tabel 6. Label T-C.33 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024



3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Ponorogo dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

- a. Meningkatkan kualitas koperasi di Kabupaten Ponorogo;
- b. Meningkatkan kualitas dan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Ponorogo;
- c. Memfasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi, UMKM dan IKM melalui pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).

2. Urusan Perdagangan



- a. Revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan di kabupaten Ponorogo;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana bagi Pedagang Kaki Lima yang ada di jalan protokol dan aloon-aloon Ponorogo melalui pembangunan Kawasan PKL;
- c. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk-produk unggulan daerah;
- d. Meningkatkan perlindungan konsumen.

3. Urusan Perindustrian

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pelaku usaha IKM yang telah ada dan penciptaan wira usaha baru;
- b. Memfasilitasi pelaku usaha IKM melalui pengembangan kawasan sentra IKM di Kabupaten Ponorogo.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Awal Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2024 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan usaha Mikro Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026. Pada tahun 2024 direncanakan ada 9 (Sembilan) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan, sasaran program/kegiatan 2024 ditetapkan Indikator kinerja program/kegiatan, target capaian kinerja, serta kebutuhan dana / pagu indikatif.



BAB V PENUTUP

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun. Renja SKPD tahun 2024 merupakan penjabaran Reviu Renstra SKPD yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran.

Dengan disusunnya Renja SKPD Tahun 2024, Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan lebih terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Namun demikian, proses pembangunan memerlukan peran serta seluruh masyarakat, baik pemerintah, legislatif, maupun masyarakat itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kerjasama dari semua pihak sangat diperlukan demi suksesnya pembangunan yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik di masa datang, serta mewujudkan Kabupaten Ponorogo yang lebih maju, berbudaya dan religius sehingga menjadikan Kabupaten Ponorogo meningkat tingkat kesejahteraannya.